

PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF PESANTREN (ANTARA IDEALITA DAN REALITA DI ERA MODERN)

Syaiful Mustofa¹

Abstract

Pesantren become one of the magnet which is very draw in conference of concept education of Islam. Pesantren is also expected by most society so can do transformation of knowledge, value, and even character to educative participant to become bookish human being and with character.

But, these days natural pesantren of dizziness in the effort study pattern synergize in pesantren with fast speed of modernity, what in this case is quickly it him information current and technology.

Leave from pesantren, efforts to improve study pattern and education of Islam in pesantren continue to be developed in order to can walk balanced with modern era which without having to leave spirit, cultural and activity of pesantren.

Keyword: *Islamic Education, Pesantren.*

Pendahuluan

Mengapa pesantren bisa *survive* sampai saat ini? Pertanyaan ini mungkin terdengar biasa-biasa saja. Bagi kebanyakan orang, realita ini tak ubahnya kejadian alamiah yang tidak perlu *ditilik* lebih detail lagi alasannya. Ternyata, pertanyaan itu sudah menggelitik Azyumardi Azra selaku ilmuwan dan pakar sejarah, dan pastinya mengusik banyak pakar pendidikan nasional, bahkan internasional, hingga merangsang mereka melakukan penelitian seputar eksistensi dan peranan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia.

Di antara banyak tokoh ilmuwan itu ada Nurchalis Madjid, dengan bukunya *Bilik-Bilik Pesantren*; ada Zamaksyari Dofier, yang telah menulis *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*; ada Mastuhu, juga telah menulis *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Di sana ada juga Arifin Imran, Ali Maschan Moesa, Mujammil Qamar, Sukamto, M. Bahri Ghazali, Turmudi Endang, Abdurrahman Mas'ud. Selain ilmuwan pribumi, keunikan dunia pesantren juga menarik perhatian para ilmuwan manca negara. Ada Clifford Geertz, yang telah menulis *Abangan, Santri, Priyai dalam masyarakat Jawa*; Alan Ronald dan Lukens, dengan penelitiannya *A Peaceful Jihad, Javanese Islamic Education dan Religious Identity Contruction*; ada juga

¹ Dosen Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana no. 50 Malang 65144

Steenbrink, Karel A, penulis buku *Pesantren Madrasah Sekolah*; juga Sindu Gazalba yang menulis *Pesantren Sebagai Wadah Komunikasi*. Tentunya banyak lagi nama-nama peneliti seputar dunia pesantren yang tidak tercantum di sini. Pemaparan ini tidak lebih untuk memperkuat asumsi bahwa pesantren masih *sustainable* dan selalu hangat untuk diperbincangkan.

Bagi kalangan pesantren, realita ini patut disyukuri, bahkan berhak untuk bangga, karena meningkatnya perhatian masyarakat luas pada dunia pendidikan dan lembaga pesantren. Dari sebuah lembaga yang hampir-hampir tak diakui eksistensi dan peran positifnya, menjadi sebuah bentuk pelembagaan sistem pendidikan yang mendapatkan “label” asli Indonesia. Maka orangpun membicarakan kemungkinan pesantren menjadi pola pendidikan nasional. Kemungkinan ini diperbesar dengan munculnya anggapan bahwa sistem pendidikan yang kini secara resmi berlaku di Indonesia adalah warisan pemerintahan Belanda yang mengandung ciri kolonial (Nurchalish Madjid, 2001: 93-94). Sebuah ciri pendidikan yang tidak bisa serta merta kita terapkan sepenuhnya di negara Indonesia, yang mayoritas muslim. Islam sendiri mempunyai konsep tradisi pemelajaran sebagaimana diteladani Rasul.

Bahkan lebih dari itu: pesantren diharapkan dapat berperan menciptakan dukungan sosial bagi pembangunan yang sedang berjalan. Sebuah dukungan yang dinamis, spontan dan langgeng. Apalagi jika kita kaitkan dengan keperluan untuk menemukan suatu pola pembangunan yang bersifat “*indigenous*”, asli sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia. Untuk harapan inilah, pemerintah kian menunjukkan perhatiannya pada lembaga pendidikan pesantren. Banyak indikasi mengarah kesana. Salah satu contoh kongkrit adalah pelaksanaan Halaqoh Ulama Pesantren Salafiyah dan Diniyah yang diadakan Kementerian Agama di UIN Maliki Malang beberapa waktu lalu.

Modernisasai dan Dunia Pendidikan Islam

Kaitannya dengan *survive*-nya pesantren sampai saat ini, Azyumardi menambahkan, sejak dilancarkannya perubahan atau modernisasi pendidikan Islam di berbagai kawasan dunia Muslim, tidak banyak lembaga pendidikan tradisional Islam seperti pesantren yang mampu bertahan. Kebanyakan lenyap setelah tergusur oleh

ekspansi sistem pendidikan “sekuler”; atau mengalami transformasi menjadi lembaga pendidikan umum; atau setidaknya menyesuaikan diri dan sedikit banyak mengadopsi isi dan metodologi pendidikan umum.

Untuk memperkuat alasannya, Azyumardi mengemukakan nasib banyak kawasan Islam dalam proses perubahan dan modernisasi. Pada umumnya, di kawasan Timur Tengah, lembaga pendidikan Islam terdiri dari tiga jenis; madrasah, kuttab, dan masjid. Sampai paruh kedua abad ke-19, ketiga lembaga pendidikan tradisional Islam ini relatif mampu bertahan. Tetapi, sejak perempat terakhir abad ke-19, gelombang perubahan dan modernisasi yang semakin kencang telah menimbulkan perubahan-perubahan yang tidak mungkin lagi dikembalikan seperti pada eksistensi semula.

Modernisasi pendidikan Islam, tidak diragukan lagi bermula di Turki menjelang pertengahan abad ke-19. Sebelum akhirnya menyebar ke hampir seluruh wilayah kekuasaan Turki Usmani di Timur Tengah. Penting dicatat, program pembaruan pendidikan di Turki semula tidak menjadikan *Medresse* (madrasah) sebagai sasaran perubahan. Mulanya hanya pembentukan sekolah-sekolah baru sesuai dengan sistem pendidikan Eropa. Pada titik ini, muncul, misalnya “*Mekteb el ilmi Harbiye*” (sekolah militer) pada tahun 1834 sesuai dengan model Prancis.

Namun selang waktu yang tidak terlalu lama (1938), Sultan Mahmud II (1808-1839) juga melancarkan pembaruan pendidikan Islam dengan memperkenalkan Sekolah Rusydiyah, yang sepenuhnya mengadopsi sistem pendidikan Eropa. Sekolah Rusydiyah ini independen atau bahkan berlawanan dengan *Medresse*. Selanjutnya pada tahun 1846, Sultan ‘Abd al-Majid mengeluarkan peraturan yang memisahkan pendidikan Islam dengan pendidikan umum; madrasah berada di bawah yurisdiksi Syaikh al-Islam, sedangkan sekolah umum (dengan berbagai tingkatannya) ditempatkan di bawah tanggung jawab langsung pemerintah. Meski tak sama, realita ini hampir serupa dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini; memisahkan lembaga pendidikan umum dan agama dalam pelaksanaan tanggung jawabnya.

Perlu diingat, sekolah umum yang diharapkan menjadi tulang punggung modernisasi ternyata berkembang relatif lambat. Ini mendorong pemerintahan Turki Utsmani untuk mengeluarkan ketetapan “*Ma’arif Ummiye Nizamnamesi*” (1869) guna memperluas dan mempercepat perkembangan sistem pendidikan umum model Eropa,

dengan mengorbankan medresse. Pukulan terakhir terhadap medresse terjadi pada tahun 1942, yaitu ketika Mustafa kamal Atatürk menghapus sistem medresse dengan mengubahnya menjadi sekolah-sekolah umum.

Pengalaman yang sama juga terjadi di Mesir. Modernisasi sistem dan kelembagaan pendidikan di Mesir dimulai oleh Muhammad Ali Pasya. Pada tahun 1833 ia mengeluarkan dekrit pembentukan sekolah dasar umum, yang pada perkembangan awalnya berdampingan dengan madrasah dan kuttab. Seiring berjalannya waktu, madrasah dan kuttab ternyata tidak mengalami perkembangan berarti. Kuttab hanya menjadi semacam pelengkap bagi sekolah umum, khususnya untuk mendapat tambahan pelajaran agama.

Pada tahun 1868, Khedive Ismail mengeluarkan ketetapan untuk mengintegrasikan madrasah dan kuttab ke dalam sistem pendidikan umum. *Toh* demikian, upaya ini tidak banyak berhasil; sistem pendidikan madrasah dan kuttab tetap bertahan dalam masa penjajahan Inggris. Namun setelah kemerdekaan, dengan alasan integrasi atau nasionalisasi sistem pendidikan nasional Mesir, pemerintahan Gamal Abdel Nasser pada tahun 1961 menghapus sistem madrasah dan kuttab (Nurchalish Madjid, 2001: 76).

Pengalaman Turki dan Mesir agaknya cukup mewakili proses mudarnya sistem pendidikan tradisional Islam dalam benturannya dengan arus modernisasi global. Situasi-situasi sosiologis dan politik yang mengitari medresse di Turki atau madrasah dan kuttab di Mesir dalam segi-segi tertentu agaknya berbeda dengan situasi yang dihadapi dunia pendidikan pesantren di Indonesia. Perbedaan-perbedaan tersebut, pada kenyataannya membuat pesantren tetap dan mampu eksis sampai saat ini. Bertolak dari kenyataan di atas, kiranya kita pun wajar jika lantas penasaran mengetahui jawaban pertanyaan pada awal tulisan ini.

Jati diri Pesantren

Secara historis, pesantren atau pondok tak lain merupakan perwujudan sistem pendidikan nasional. Selain identik dengan keislaman sebagai ajaran mayoritas bangsa, pesantren juga mengandung makna keindonesiaan (*Indigeneous*). Sebab, lembaga serupa pesantren sebenarnya sudah ada sejak masa kekuasaan Hindu-Buddha. Sehingga

Islam tinggal meneruskan dan mengislamkan model-model yang sudah ada. Tentunya ini tidak lantas mengecilkan peranan Islam dalam mempori pendidikan di Nusantara ini, sejak masa prapenjajahan.

Setuju dengan pandangan Nurcholish Madjid, penulis juga berandai: jika saja nusantara tidak pernah mengalami masa penjajahan, besar kemungkinan model pendidikan nasional akan mengikuti jalur-jalur pendidikan yang ditempuh pesantren. Maka perguruan-perguruan tinggi yang ada saat ini pun bukan bernama UI, ITB, UGM, Unair, atau yang lainnya, tapi bisa jadi namanya “universitas” Tremas, Lirboyo, Tebuireng, Tambakberas, Salafiyah Pasuruan, Genggong, dan seterusnya. Pemikir muslim yang biasa disapa Cak Nur juga berargumentasi: kemungkinan tersebut bisa kita tarik setelah melihat dan membandingkan dengan pertumbuhan pendidikan di banyak negara-negara Barat yang hampir semua universitasnya bermuara dari perguruan-perguruan bernuansa keagamaan, serupa pesantren di Indonesia. Mungkin juga, seandainya kita tidak pernah dijajah, lokasi-lokasi awal perkembangan pesantren tidak akan berada di daerah-daerah pinggiran, melainkan menyebar di semua pusat-pusat kota di Indonesia.

Dari penjelasan sederhana ini saja bisa kita proyeksikan apa peranan dan dimana letak sebenarnya sistem pendidikan pesantren dalam masyarakat Indonesia untuk masa depan bangsa yang lebih berkepribadian. Gambaran kongkritnya bisa kita jelaskan dengan menganalogikan pesantren di Indonesia (ambil sebagai misal Tebuireng) dengan “pesantren” yang didirikan oleh pendeta *Harvard* di Boston, Amerika. Pesantren Tebuireng menghasilkan apa yang bisa dilihat oleh rakyat Indonesia sekarang, dan “pesantren”-nya pendeta Harvard itu telah tubuh menjadi sebuah universitas yang paling “prestigious” di Amerika, dan hampir secara pasti memegang kepeloporan dalam pengembangan ilmu pengetahuan modern dan gagasan-gagasan mutakhir.

Dalam hal kekuasaan, apalagi. Harvard memegang rekor dalam menghasilkan orang-orang besar yang menduduki kekuasaan tertinggi di Amerika Serikat. Tetapi di Indonesia, sebagaimana kita ketahui, peranan “Harvard” itu tidak dimainkan oleh Tebuireng, Tremas, ataupun Lirboyo. Pernah sekali Indonesia dipimpin Abdurrahman Wahid, sebagai perwakilan kalangan santri. Namun pada kenyataannya, Abdurrahman adalah “penjelmaan” santri *plus*. Peranan “*plus*”-ny lah yang mampu mengangkat

Abdurahman diterima hampir semua komponen bangsa. Selebihnya, peranan “Harvard” dimainkan oleh perguruan-perguruan tinggi kelanjutan lembaga masa penjajahan.

Bagaimana itu terjadi? Pada titik ini, kalangan pesantren harus mengakui ada kesenjangan antara pesantren dan dunia global dengan ciri modernnya yang masih didominasi oleh pola budaya Barat dan diatur mengikuti pola-pola itu. Sementara dunia pesantren, disebabkan faktor historinya, belum sepenuhnya bisa menerima pola-pola budaya itu. Karenanya, dunia pesantren kurang memiliki kemampuan dalam mengimbangi, apalagi menguasai kehidupan modern, sebagai dinamika zaman. Realita ini lantas melahirkan anggapan adanya kesenjangan waktu antara dunia pesantren dan realita zaman.

Kesenjangan dimaksud bukan lantas disebabkan realita pesantren sebagai pendidikan islami. Ajaran agama (Islam) bukanlah sebab “ketertinggalan” pesantren dalam berkiprah di dunia global. Dalam hal ini, universitas Harvard, misalnya, relevansinya dengan perkembangan zaman, bahkan kekuasaan tidaklah diperoleh dengan meninggalkan samasekali jiwa “kepesantrenannya”. Di sana masih terdapat bagian-bagian yang mengajarkan teologis, disamping monumen-monumen keagamaan yang banyak terdapat dalam lingkungan kampusnya seperti gereja-gereja, chapel-chapel, dan koleksi barang-barang keagamaan. Bahkan dalam bidang teologi, Harvard masih meneruskan peranan historisnya sebagai penganut madhab unitarianisme.

Pemaparan fenomena di atas menunjukkan bahwa untuk bisa memainkan peranannya secara global, pesantren tidak perlu menghilangkan kepribadiannya sebagai lembaga keagamaan. Bahkan tradisi-tradisi agama yang dimiliki pesantren itu sebenarnya merupakan ciri khusus yang harus dipertahankan, karena di sinilah letak kelebihanannya dibandingkan lembaga pendidikan umum.

Pesantren di Tengah Tuntutan Modernisasi

“*Al-haqqu yutlab wala yu'tha*”. Demikian ungkap KH. Sukri Zarkasi, pimpinan Pondok Modern Gontor saat menyampaikan orasinya di hadapan para ulama dan puluhan Kiai pengasuh pondok pesantren pada acara Halaqoh Ulama Pesantren Salafiyah dan Diniyah di gedung Rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 8 Februari 2010.

Jika boleh diartikan, ungkapan tersebut mungkin maksudnya: hak itu harus diminta (dituntut), agar bisa diberi. Pastinya, ungkapan itu sengaja Kiai Sukri sampaikan di tengah upaya tuntutan kalangan pesantren agar pemerintah, Kementerian Agama RI selaku “Bapak” pendidikan pesantren bisa semakin menghargai peran lembaga pendidikan kaum santri dalam upaya turut mencerdaskan bangsa.

Seperti penuturan Kiai lulusan Al-Azhar ini: meski sudah banyak alumni Gontor yang berperan aktif dalam kancah nasional, namun ijazah mereka belum diakui. Baru beberapa tahun belakangan ini lulusan Gontor mendapatkan legalitas negara. Itupun setelah melalui perjuangan panjang dan melelahkan. Karenanya, Kiai Sukri mengajak seluruh pimpinan pondok yang hadir agar terus memperjuangkan “hak” yang mesti didapat kalangan pesantren.

Itulah sekelumit kisah perjuangan pondok Gontor setelah 72 tahun tidak diakui pemerintah. Menanggapi hal itu, Rektor Maliki Malang, Prof. Imam Suprayogo pun merasa aneh. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi, di tengah para pemimpin Indonesia yang muslim? Presiden dan wakilnya muslim, Menagnya muslim; kiprah pondok Gontor dalam skala nasional, tidak diragukan, cukup besar. Jika selevel Gontor saja masih dimarginalkan keberadaannya, lantas bagaimana pondok-pondok pesantren yang berlevel lebih kecil?

Serupa dengan kebingungan Imam, dan merasakan keresahan kalangan santri, pemerintah pun meminta UIN Maiki bersama kalangan pejabat terkait, untuk menyelenggarakan acara halaqah tersebut. Sebagai peserta, penulis melihat harapan positif bagi dunia pesantren ke depan. Setidaknya, ini langkah awal kepedulian pemerintah untuk semakin “menghargai” metode pendidikan *ala* pesantren.

Sebagai model pendidikan tradisional yang mengakar di masyarakat, pemerintah berupaya melestarikan sistem pendidikan pesantren, dan sebisa mungkin membantu agar terus berkembang. Harapannya ke depan, tidak ada lagi kasus kegagalan warga yang ingin aktif berkompetisi di tengah masyarakat hanya karena berijazah pesantren yang belum diakui. Semisal tidak bisa mencalonkan diri jadi calon DPR/DPRD karena menggunkan ijazah pondok. Atau mentok tertolak di level administratif saat mendaftar pencalonan kepala desa/lurah.

Sebagaimana dimaklumi, hal mendasar yang membedakan pesantren dengan lembaga umum lainnya adalah semangat serta ruh pendidikannya, yakni ibadah. Rujukan dasar pendidikan di pesantren adalah ajaran agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadits, dan ijihad ulama dalam ijma' dan qiyas. Filosofi pendidikan pesantren didasarkan atas hubungan yang bermakna antara manusia, ciptaan atau makhluk, dan Allah SWT. Ruh pendidikan itu dijalani oleh semua guru dan santri dalam kegiatan mereka mencari ilmu, pengembangan diri (M. Dian Nafi', 2007: 9).

Tanpa niatan menggeser ruh pendidikan pesantren, sebagai upaya apresiatif keinginan pemerintah di atas, penulis justru melihat adanya tantangan baru yang lebih berat dan kompetitif. Jika legalitas benar-benar diberikan kepada pesantren secara menyeluruh, tuntutan berkompetisi dengan lembaga lainnya harus dinilai sebagai konsekuensinya. Bukan saja antar pesantren, tapi lembaga-lembaga pendidikan non-pesantren harus juga dilihat sebagai saingan. Mampukah pesantren merealisasikannya?

Sebagai sesama warga negara, kalangan santri memang selayaknya diperhatikan sama dengan masyarakat non-santri, termasuk cara pengelolaan pendidikannya. Model pendidikan pesantren bisa mendapatkan hak yang sama dengan model pendidikan umum lainnya. Inilah kemungkinan maksud dari ungkapan Kiai Sukri di atas. Bagi penulis, itu saja belum cukup. Jika hanya mau menuntut hak sebagai lembaga pendidikan tanpa memenuhi kewajiban yang sama, besar kemungkinan dunia pesantren bisa dinilai tidak sportif.

Untuk mendapatkan hak yang sama, kewajibannya harus sama juga. Maka penulis cenderung menambahkan ungkapan di atas dengan: *ba'da ityani bi al-wajibat*, setelah melaksanakan kewajiban. Sah-sah saja kalangan pesantren menuntut legalitas dari pemerintah seperti lembaga pendidika lainnya. Namun jangan lupa, ada standarisasi yang dipakai pemerintah sebelum melegalkan sebuah lembaga pendidikan. Itulah yang penulis maksud dengan *al-wajibat* (kewajiban), yang harus dilalui sebelum menuntut hak.

Ada juga tuntutan dari para elit santri (kiai dan para ustadz) agar pemerintah membiarkan pesantren dengan sistem dan kurikulum pesantren. Tidak perlu ada koreksi pada sistem pendidikannya yang sudah berjalan selama ini. Sebagai komunitas pesantren, penulis justru menyangsikan motif tuntutan tersebut, bahkan berpeluang

menimbulkan “kecemburuan” dari lembaga lainnya. Bagaimana mau minta hak yang sama, tapi tidak mau menjalankan kewajiban yang sama juga? Tidak fair, kan!?

Selain pemaknaan di atas, muatan kata ‘kewajiban’ semestinya juga dipahami sebagai konsekuensi logis pesantren menjadi lembaga pendidikan “paling islami”. Pesantren harus menjadi *ikon* Islam. Agama yang –diakui atau tidak– saat ini berada pada titik paling rendah di bidang sains dan teknologi, dibandingkan agama-agama besar lainnya. Maka, jika *ikon* Islam tidak lagi merasa perlu meningkatkan kualitas keilmuan dan teknologinya, realita muslim sebagai komunitas bawahan juga pinggiran semakin sulit dibantah.

Hanya mimpi tak berujung, untuk menjadikan Islam sebagaimana adigium: *Al-Islam ya’lu wala yu’la alaih*, Islam adalah unggul, dan tak terungguli oleh yang lain. Jika lembaga-lembaga pendidikan Islam, termasuk juga pesantren mencukupkan apa yang sudah ada, tidak merasa perlu bersaing dengan komunitas lain; sepatutnya kita rubah sendiri adigium di atas menjadi: *Al-Islam munkhafid wala yankhafidu minhu, Islam rendah*, dan tak ada yang lebih rendah darinya. *Na’udzubillahi mi dzalik*.

Kaitannya dengan tuntutan pesantren di era modernisasi, ada sebuah realita sederhana tetapi berdampak serius, yakni adanya anggapan bahwa perkataan “modern” berkonotasi “kebaratan”. Meski tidak sepenuhnya benar, penulis juga melihat tidak salah. Diakui atau tidak, memang nilai-nilai “Barat” mendominasi kemoderenan itu sendiri. Pada titik ini, kita pun tergiring untuk mengakui bahwa peradaban modern yang melanda dunia, termasuk Indonesia, adalah hasil invasi peradaban Barat. Tidak jarang terdengar bahwa “modernisasi” adalah penghalusan kata “westernisasi”.

Toh demikian, kita tetap dituntut lebih objektif dalam menilai segala hal. Sejatinya nilai-nilai modern bersifat universal. Berbeda dengan nilai-nilai Barat yang hanya berskala lokal atau regional. Maka semestinya, untuk memilah percampuran antara modernisasi dan westernisasi adalah cakupan skala nilai-nilainya: memilah hal yang universal dari banyak hak yang berskala lokal.

Harus diakui, nilai universal modernisasi adalah keilmuan dan teknologi. Maka tantangan di zaman modern pada hakekatnya adalah tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara tantangan yang bersifat khusus Barat adalah akibat sampingan, dan tentunya tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa sekarang ini orang-orang Barat

masih memegang dominasi kepemimpinan dunia. Kenyataan ini serupa dengan pengaruh Arab pada dunia Islam. Itu saja.

Pengembangan Kurikulum Pesantren

Seperti halnya lembaga-lembaga pendidikan lainnya, pesantren tentunya bertujuan mengantar peserta didiknya ke arah yang lebih baik dalam semua aspeknya: kognitif, adaptif dan psikomotorik. Meski secara sederhana, hakekat lembaga pendidikan pastinya dituntut terus mengembangkan kurikulum untuk acuan kegiatan belajar-mengajar dalam rangka mengembangkan kemampuan SDM atau sasaran pendidikan dan latihan. Kurikulum diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh anak didik untuk mencapai tingkatan tertentu. Pada aspek ini, pesantren bisa mengarahkan peserta didiknya untuk menghadapi hakekat tuntutan di era modernisasi seperti dijelaskan di atas. Artinya, kurikulum menjadi instrumen pencapaian tujuan belajar, termasuk di pesantren.

Dalam arti luas, kurikulum adalah segala upaya dan kegiatan yang mempengaruhi proses belajar. Dengan demikian, setiap proses yang mempengaruhi proses pendidikan, baik langsung atau tidak langsung merupakan bagian kurikulum. Untuk menyusun kurikulum yang relevan dan matang perlu dipertimbangkan prinsip-prinsip berikut: *Pertama*, dasar filosofis negara yang berlangsung dan mengarahkan tujuan pendidikan nasional. *Kedua*, dasar sosiologis yang menyangkut keadaan masyarakat, ekonomi, adat istiadat, budaya, kesehatan, dan sebagainya. *Ketiga*, dasar psikologis yang mempertimbangan faktor-faktor terkandung dalam diri sasaran pendidikan-latihan, misalnya minat, kebutuhan, kemampuan, pengalaman, dan sebagainya. *Keempat*, dasar organisasi, dimana kurikulum disajikan dalam bentuk tertentu, baik dalam luas bahan, isi maupun urutan. Untuk ini biasanya daftar pelajaran atau mata kuliah disusun dalam suatu silabi yang akan mendiskripsikan tujuan-tujuan kurikulum tersebut.

Dalam hal ini ada empat macam tujuan, yaitu: *Pertama*, tujuan umum, yang identik dengan tujuan pendidikan nasional. *Kedua*, tujuan instusional, yaitu tujuan lembaga atau pesantren bersangkutan. *Ketiga*, tujuan kurikuer, yakni tujuan dari setiap bidang studi atau mata pelajaran. *Keempat*, tujuan instruksional, yaitu tujuan yang

sudah spesifik yang mencakup suatu pengetahuan, sikap atau keterampilan yang akan dicapai dengan pemberian materi pembelajaran yang bersangkutan (A. Halim, 2005: 16).

Dalam penerapannya, kurikulum pesantren itu memadukan sumber ajaran ketuhanan menjadi peragaan individual untuk disemaikan ke dalam hidup bermasyarakat. Selain mengenal ranah kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotor (perilaku) dalam pengajarannya, sejak semula pesantren telah mendasarkan diri pada tiga ranah utama; yaitu *fuqahah* (kecakapan pengetahuan agama), *thabiah'ah* (perangai, watak, atau karakter), dan *kafa'ah* (kecakapan operasional). Jika pendidikan merupakan upaya perubahan, maka yang berubah dan diubah adalah ketiga ranah itu, tentu saja perubahan ke arah lebih baik (M. Dian Nafi', 1996: 34).

Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren berupaya selalu merujuk muatan dan segala hal yang berkaitan dengan proses belajar-mengajar dari khazanah keislaman. Untuk mengistilahkan "pendidikan" dunia pesantren masih terlalu "lugu" untuk menerima istilah tersebut untuk mewakili keutuhan konsep pendidikan yang dimaksud dalam tradisi Islam. Masih terdapat sejumlah istilah yang tekanan makna dan konsepnya akan semakin melengkapi istilah "pendidikan". Sejumlah istilah dimaksud, antara lain:

1. **Tarbiyah**: usaha sadar terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik sejak tahap "benih" sampai masa "pembuahan", secara berkesinambungan dan sistematis. "*Segala puji bagi Allah yang mentarbiyah alam semesta*" (QS. 2:2); "*Wahai Tuhanku, kasihanilah kedua orang tuaku, seagaimana keduanya telah mendidik aku waktu kecil*" (QS. 17:24).
2. **Ta'lim**: pembelajaran tanda-tanda baik yang *qauliyah* (terucapkan/tekstual) dan *kauniyah* (terujud/faktual) sehingga peserta didik mampu mendefinisikan diri dan lingkungannya untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. "*Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya....*" (QS. 2:31-32).
3. **Tadris**: ikhtiar memampukan peserta didik untuk mengungkapkan makna teks, fenomena alam dan sosial, memahami siklus kehidupan, serta dapat

membangun komunitas pembelajaran dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

4. **Taslik**: peragaan hasil ta'lim yang dengannya peserta didik menerapkan dalil dengan menggumuli kenyataan, memperoleh pengalaman, dan mengungkap ilmu temuan. Pembelajaran menjadi semakin mudah jika seseorang belajar dalam tataran praksis. (QS. 18: 60-82)
5. **Tatsqif**: pembumian, pelembagaan, atau pembudayaan hasil ta'lim yang dengan itu peserta didik dapat mengalihbentukkan teks dari bisbah yang "melangit" ke nisbah yang "membumi". Manusia akan semakin bermartabat jika berpegang teguh pada hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama makhluk. (QS. 3: 112)
6. **Ta'dib**: penerusan dan pewarisan nilai-nilai yang memungkinkan peserta didik menghayati semangat zaman dan terdorong untuk menyumbang bagi perbaikan peradaban. (QS. 4: 9)
7. **Irsyad**: pembinaan spiritual peserta didik sehingga dapat menjangkau keselamatan diniawi dan ukhrawi. Jika orang mampu membedakan anatara yang menyelamatkan dan menjerumuskan, maka tidak perlu lagi agama. (QS. 2:256) (M. Dian Nafi', 1996: 34).

Dengan demikian, modus pendidikan di pesantren itu dapat dikelompokkan ke dalam dua paradigma tarbiyah; *tarbiyah ta'limiyah*, *terbiyah sulukiyah*.

Tarbiyah ta'limiyah: usaha sadar terencana untuk merawat dan mengembangkan potensi peserta didik sejak "benih" sampai "pembuahan" secara berkesinambungan dan sistimatik yang mendasarkan pada penguasaan tanda-tandanormatif, teks, dan dalil. Kurikulum dirancang sebagai paket perubahan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Rujukannya adaah kitab-kitab terutama yang berdasarkan ayat-ayat *qaliyah* dan buku-buku teks.

Tarbiyah sulukiyah: merupakan usaha sadar terencana untuk merawat dan mengembangkan potensi peserta didik sejak tahap "benih" hingga "pembuahan" secara berkesinambungan dan sistimatik yang mendasarkan pada peguasaan kecakapan bertindak dengan memperhatikan sekaligus tanda-tanda *qauliyah* dan *kauniyah* sehingga peserta didik dapat mendefinisikan diri dan lingkungannya untuk mewujudkan

kenyataan hidup yang lebih baik. Kurikulum dirancang sebagai paket pengetahuan, pengalaman, dan kesempatan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Rujukannya adalah buku kehidupan (Ibrahim Ad-Dabag, 2004: 213).

Penutup

Harus diakui, pandangan-pandangan di atas bersifat apologis-subjektif. Atau setidaknya sebagai catatan ilustrasi-generalisasi, artinya merupakan penarikan kesimpulan umum, tanpa memperhatikan pengecualian-kecualian yang mungkin ada. *Toh* demikian, dalam peranannya sebagai satu dari sekian pola lembaga pendidikan, penulis melihat keniscayaan pesantren merefleksikan beberapa hal berikut: *Pertama*, pesantren berhak, bahkan lebih berguna mempertahankan fungsi pokoknya sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan agama. Realita ini justru menjadi ciri khas pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang tetap bertahan di Indonesia, di tengah banyak negara muslim tidak mampu menjaga eksistensi pendidikan semisal pesantren. Tapi mungkin diperlukan suatu tinjauan kembali sedemikian rupa sehingga ajaran-ajaran agama yang diberikan merupakan jawaban yang komprehensif atas persoalan makna hidup dan kehidupan, selain tentu saja disertai dengan pengetahuan secukupnya tentang kewajiban praktis seorang Muslim sehari-hari.

Kedua, pesantren harus tanggap dengan tuntutan-tuntutan hidup anak didiknya kelak dalam kaitannya dengan perkembangan zaman. Di sini pesantren dituntut dapat membekali mereka dengan kemampuan riil yang didapat melalui pendidikan dan latihan umum secara memadai. Di bagian ini pun, sebagaimana layaknya yang terjadi sekarang, harus tersedia jurusan-jurusan alternatif bagi anak didik sesuai dengan potensi dan bakat mereka. Hal ini bisa terprogram dalam muatan kurikulum pesantren.

Dalam menghadapi tantangan di era modernisasi, sebagai lembaga pendidikan, pesantren dituntut aktif memberi responsi positif. Bukan sebaliknya “membelakangi” modernisasi yang sudah melanda segala sisi kehidupan masyarakat dunia saat ini. Respon pesantren tentunya lebih menitikberatkan pada aspek nilai-nilai modernisasi yang bersifat universal, yakni peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk hal ini, pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah memprogramkan bantuan khusus pesantren bagi pesantren yang menyelenggarakan Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK). Untuk tahun ini, setidaknya ada 31 pesantren se Indonesia yang dinilai pemerintah layak, karenanya dibantu untuk peningkatan teknologi di kalangan santri. Nominal bantuan terbilang lumayan: berkisar 800 juta, sampai 15 milyar.

Akhirnya, kita semua bisa berharap agar tujuan pendidikan pesantren bisa bermuara pada pembentukan pribadi yang memiliki kesadaran tinggi bahwa ajaran agama Islam merupakan ajaran yang menyeluruh. Bukan ajaran yang terkotak pada aspek ubudiah semata, tapi bisa merespon tantangan-tantangan dan tuntutan-tuntutan hidup dalam konteks ruang dan waktu yang ada, baik berskala nasional ataupun global.

Kita juga berharap agar pemerintah dalam kebijakannya merumuskan standarisasi pendidikan pesantren, adalah kebijakan yang hakekatnya membantu dunia pesantren dalam upaya pengembangan diri. Bukan kebijakan yang justru bertujuan sebaliknya: “memberengus” secara halus lembaga pendidikan Islam di Indonesia, sebagaimana terjadi di Turki dan Mesir. *Wallahu a’lam bi al shawab.*

Daftar Pustaka

- Ad-Dabag, Ibrahim. 2004. *Al-tarbiyah as-Sulukiyah ‘inda Badi’ az-Zaman, Soz li ath-Thaba’ah wa an-Nasyr.* Maroko: Marakesh.
- Bruinessen. 1999. *NU, Tradisi, Relasi-relasi kuasa, Pencarian Wacana Baru.* Yogyakarta: Lkis
- Farhan, Hamdan dan Syarifuddin. 2005. *Titik Tengkar Pesantren, Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren.* Yogyakarta. Pilar Religia.
- Halim, dkk. 2005. *Manajemen Pesantren,* Pustaka Pesantren, cet. I. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara.
- Madjid, Nurchalish. 2001. *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan.* Jakarta: Dian Rakyat, Paramadina.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2003. *Menggagas Pesantren Masa Depan.* Yogyakarta: CV. Qalam.
- Nafi’, M. Dian. Dkk. 2007. *Praxis Pembelajaran Pesantren.* Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara.
- Nafi’, M. Dian. 1996. *Sekilas Kurikulum Pondok Pesantren Al-uayyad.* Yogyakarta: Forum Pesantren.